

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori Sinyal pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973 melalui penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling*. Menurut Spence (1973), “sinyal digunakan dalam situasi ketidakpastian untuk menyampaikan informasi yang sulit diamati secara langsung. Sinyal yang efektif, seperti pendidikan, harus memiliki biaya tertentu agar hanya individu dengan kemampuan tinggi yang bersedia mengeluarkannya. Dengan begitu, sinyal membantu membedakan pihak-pihak yang memiliki kualitas berbeda dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan”. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat asimetri informasi antara dua pihak yang berbeda. Pihak yang memiliki informasi lebih akan memberikan sinyal untuk mengurangi ketidakpastian, sedangkan pihak penerima sinyal akan menilai dan merespons sinyal tersebut dalam pengambilan keputusan.

“Teori sinyal diartikan suatu isyarat perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal dapat berwujud berbagai bentuk baik secara langsung dapat diamati dan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan untuk menyatakan harapan pasar atau pihak eksternal melakukan perubahan dan penilaian perusahaan. Artinya, sinyal mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk merubah penilaian pihak eksternal perusahaan” (Ghozali, 2021).

Menurut Nur et al., (2024), “Teori sinyal memiliki kelemahan, terutama dalam hal keandalan informasi yang disampaikan. Meskipun bertujuan mengurangi asimetri informasi, sinyal yang diberikan perusahaan tidak selalu dapat dipercaya karena dapat dimanipulasi oleh manajemen demi menjaga citra atau harga saham. Perusahaan kecil atau yang sedang bermasalah juga mungkin tidak mampu mengeluarkan biaya untuk menyampaikan informasi yang kredibel, memperbesar kesenjangan informasi dengan perusahaan besar. Kompleksitas laporan keuangan

dan potensi manipulasi seperti manajemen laba makin memperburuk kondisi, ditambah dengan risiko konflik kepentingan auditor. Oleh karena itu, penerapan teori sinyal perlu disertai pengawasan dan regulasi yang ketat agar informasi yang disampaikan benar-benar dapat dipercaya”.

Menurut Erawati dan Latifah (2018) dalam Ayem dan Enumbi (2024), “Teori sinyal (*Signaling Theory*) menjelaskan pentingnya perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada pihak eksternal sebagai upaya mengatasi adanya asersi informasi antara manajer dan pemegang saham. Informasi internal perusahaan berperan sebagai sinyal bagi para pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi serta memengaruhi pandangan terhadap prospek perusahaan ke depan. Untuk mengurangi asimetri informasi tersebut, perusahaan dapat memberikan sinyal positif melalui penyampaian informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga membantu menurunkan ketidakpastian terkait masa depan perusahaan”.

“Informasi yang diumumkan kepada publik berfungsi sebagai sinyal bagi investor dalam menentukan keputusan investasinya. Apabila pengumuman tersebut mengandung informasi yang bersifat positif, maka pasar diperkirakan akan merespons pada saat informasi itu diterima. Setelah informasi diumumkan dan diketahui oleh seluruh pelaku pasar, mereka akan terlebih dahulu menafsirkan dan menganalisis isi informasi tersebut, apakah tergolong sebagai kabar baik (*good news*) atau kabar buruk (*bad news*). Jika informasi tersebut dipandang sebagai kabar baik oleh investor, maka hal ini akan memicu terjadinya perubahan dalam volume transaksi saham di pasar” (Jogiyanto, 2013 dalam Sirait dan Tarmizi, 2024).

Menurut Jogiyanto (2014) dalam Marturiana dan Idayati (2024), “Nilai perusahaan dapat meningkat apabila manajemen secara sukarela menyampaikan informasi yang telah disusun secara kredibel, sehingga mampu mengurangi ketidakpastian yang mungkin dihadapi pihak eksternal terkait prospek investasi di masa mendatang”. “Perusahaan dalam mengungkapkan informasinya berusaha untuk memberikan sinyal positif mengenai kinerjanya yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Para investor melihat apabila perusahaan mempunyai

profitabilitas yang tinggi maka perusahaan tersebut dianggap menunjukkan prospek masa depan yang baik, sehingga para investor merespon sebagai sinyal positif dan nilai perusahaan akan meningkat” (Arsyad dan Riduwan, 2021). Menurut Sari dan Trisnawati (2024), “Pernyataan perusahaan mengenai pembagian dividen dapat dianggap sebagai sinyal positif oleh investor, karena menunjukkan potensi keuntungan yang dapat investor peroleh”.

2.2 Nilai Perusahaan

Menurut Mardiyanto (2009) dalam Sukmawati *et al.*, (2023), “Tujuan suatu perusahaan yaitu untuk memaksimalkan laba, memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan”. Menurut Husnan (2014) dalam Amellia (2023), “Nilai perusahaan adalah jumlah yang bersedia dibayar oleh pihak pembeli jika perusahaan dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin besar pula tingkat kesejahteraan yang akan diperoleh oleh pemilik perusahaan”.

Menurut Barnades dan Suprihadi (2020) dalam Julyanti (2025), “Pentingnya nilai perusahaan menyebabkan investor dan kreditur menjadi lebih selektif dalam mengambil keputusan terkait investasi maupun pemberian kredit kepada perusahaan. Nilai perusahaan yang baik memberikan sinyal positif kepada investor untuk menanamkan modal, sedangkan bagi kreditur, nilai perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya, sehingga mengurangi kekhawatiran dalam memberikan pinjaman. Tingginya nilai perusahaan juga menunjukkan bahwa kesejahteraan para pemilik terjamin, serta mampu menarik minat calon investor untuk menanamkan modal”. Menurut Septriana dan Mahaeswari (2019) dalam Wulansari dan Aziz (2021), “Nilai perusahaan mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap kondisi perusahaan selama menjalankan aktivitas operasionalnya dalam jangka waktu yang cukup panjang, yakni sejak perusahaan didirikan hingga saat ini”.

Menurut Ermanda dan Puspa (2022), “Nilai perusahaan mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola aset yang dimiliki. Nilai tersebut menunjukkan seberapa efektif atau tidaknya manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Penilaian ini dapat diamati melalui hasil pengukuran kinerja

keuangan perusahaan”. Menurut Ross *et al*, (2020), “Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan yaitu:”

1. “*Price Earning Ratio (PER)*”

“*Price Earning Ratio* menunjukkan besarnya dana yang akan dikeluarkan oleh investor untuk memperoleh laba”

2. “*Price Sales Ratio*”

“*Price Sales Ratio* digunakan apabila perusahaan mengalami laba negatif dalam periode yang panjang sehingga *Price Earning Ratio* tidak bermakna”.

3. “*Tobin’s Q*”

“*Tobin’s Q* didefinisikan sebagai nilai pasar aset perusahaan dibagi dengan biaya pengganti (*replacement cost*) aset perusahaan. Menghitung rasio *Tobin’s Q* secara akurat cukup sulit karena harus memperkirakan biaya pengganti aset perusahaan sulit.

4. “*Market to Book Ratio*”

“*Market to Book* digunakan untuk membandingkan nilai pasar yang berasal dari investasi suatu perusahaan terhadap biaya perolehannya”

5. “*Enterprise Value – EBITDA Ratio*”

“*Enterprise Value – EBITDA Ratio* digunakan untuk mengukur nilai perusahaan dengan estimasi dari aset operasi yang dimiliki oleh perusahaan. Aset operasi milik perusahaan yang dimaksud adalah seluruh aset perusahaan kecuali kas”.

Nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi *Price to Book Value (PBV)*. Menurut Sjarif dan Asyik (2024), “*PBV* dapat mengukur kredibilitas perusahaan dalam persepsi masyarakat”. Menurut Firmansyah (2023), “*PBV* mengindikasikan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan”. Menurut Tambuwun *et al.*, (2024), “*Price to Book Value (PBV)* memiliki beberapa keunggulan, yang pertama adalah nilai buku yang digunakan bersifat stabil dan sederhana sehingga dapat dibandingkan dengan harga pasar. Keunggulan kedua adalah *PBV* memungkinkan perbandingan antar perusahaan

dalam sektor yang sama untuk mengidentifikasi apakah suatu saham tergolong mahal atau murah”.

Menurut Alhakim (2019) dalam Sihombing *et al.*, (2025), “*Price to Book Value (PBV)* digunakan untuk menilai apakah harga saham tergolong murah atau mahal, dengan acuan batasan nilai 1. Apabila *PBV* besar dari 1, hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi daripada nilai bukunya sehingga saham dikategorikan sebagai *overvalued*, apabila *PBV* sama dengan 1, saham dianggap wajar atau *fairvalued*, dan apabila *PBV* kurang dari 1, hal ini menunjukkan nilai pasar saham lebih rendah dibandingkan nilai buku, sehingga saham dikategorikan sebagai *undervalued*”. Menurut Warae *et al.*, (2024), “*PBV* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:”

$$Price\ to\ Book\ Value = \frac{\text{Harga Pasar per Lembar Saham}}{\text{Nilai Buku per Lembar Saham}} \quad (2.1)$$

Menurut Primasatya dan Arliana (2024), “Adapun jenis-jenis harga saham sebagai berikut:”

1. “Harga Nominal”

“Harga yang tercantum pada sertifikat saham, yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang diterbitkan. Besarnya harga nominal memiliki arti penting karena sering menjadi dasar dalam penentuan dividen minimal”.

2. “Harga Perdana”

“Harga saham pada saat pertama kali dicatatkan di bursa efek. Harga ini biasanya ditentukan oleh emiten bersama dengan penjamin emisi (*underwriter*). Harga perdana menjadi acuan awal untuk mengetahui harga jual saham kepada masyarakat”.

3. “Harga Pasar”

“Harga pasar terbentuk setelah saham diperdagangkan di bursa. Pada tahap ini, transaksi tidak lagi melibatkan emiten maupun penjamin emisi. Harga pasar mencerminkan harga saham di pasar sekunder dan dianggap sebagai representasi nilai perusahaan penerbitnya, mengingat interaksi harga langsung

antara investor dan perusahaan sangat jarang terjadi. Harga pasar ini biasanya diumumkan setiap hari melalui surat kabar atau media lainnya”.

4. “Harga Pembukaan”

“Harga yang ditawarkan oleh penjual atau pembeli saat bursa dibuka. Terkadang, transaksi sudah terjadi di awal hari bursa, dan harga yang disepakati dapat menjadi harga pasar. Namun, tidak selalu harga pembukaan identik dengan harga pasar”.

5. “Harga Penutupan”

“Harga yang tercatat pada akhir hari perdagangan di bursa. Transaksi yang terjadi menjelang akhir sesi dapat menghasilkan harga penutupan yang juga menjadi harga pasar pada hari tersebut. Meskipun demikian, harga ini tetap disebut sebagai harga penutupan”.

6. “Harga Tertinggi”

“Harga paling tinggi yang dicapai oleh suatu saham dalam satu hari perdagangan. Harga ini bisa terjadi apabila terdapat beberapa transaksi atas saham yang sama pada harga yang berbeda”.

7. “Harga Terendah”

“Harga paling rendah dari suatu saham dalam satu hari bursa. Harga ini juga dapat terbentuk apabila terjadi beberapa kali transaksi pada harga yang berbeda”.

8. “Harga Rata-Rata”

“Harga rata-rata merupakan nilai tengah yang diperoleh dari perhitungan antara harga tertinggi dan harga terendah yang terjadi selama satu hari perdagangan”.

Menurut Kieso *et al.*, (2020), “*Book value per share (BVPS) measures the amount each ordinary share would receive if the company were liquidated at the amounts reported on the statement of financial position*”. Artinya, “Nilai buku per lembar saham menunjukkan besarnya jumlah yang akan diterima oleh setiap pemegang saham biasa apabila perusahaan dilikuidasi, dengan mengacu pada

jumlah yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. *BVPS* dapat dihitung dengan cara:”

$$\text{Book Value per Share} = \frac{\text{Total Equity}}{\text{Outstanding Ordinary Shares}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

Book Value per Share : Nilai buku per lembar saham

Total Equity : Total Ekuitas

Outstanding Ordinary Share : Total saham biasa yang beredar

Menurut Weygandt *et al.*, (2022), “Dalam menghitung *BVPS* (*Book Value Per Share*), penting untuk memperhatikan apakah perusahaan memiliki saham preferen dalam struktur modalnya. Apabila perusahaan menerbitkan saham preferen, maka langkah perhitungan *BVPS* adalah sebagai berikut:”

1. “Menghitung ekuitas untuk pemegang saham preferen, yaitu dengan menggunakan nilai *call price* dari saham preferen ditambah dengan dividen tertunggak (*dividend in arrears*). Apabila saham preferen tidak memiliki *call price*, maka perhitungannya didasarkan pada nilai par saham tersebut. Dividen tertunggak merupakan dividen yang belum dibayarkan kepada pemegang saham preferen kumulatif apabila perusahaan gagal melakukan pembayaran dividen pada periode sebelumnya”. Menurut CorporateFinanceInstitute.com, “*Call price* adalah harga yang akan dibayarkan oleh penerbit saham preferen kepada pemegang saham apabila penerbit memilih untuk menebus (membeli kembali) saham tersebut sebelum jatuh tempo”.
2. “Menentukan ekuitas untuk pemegang saham biasa, yaitu dengan cara mengurangi ekuitas saham preferen dari total ekuitas perusahaan”.
3. “Menghitung *BVPS* (*Book Value per Share*) dengan membagi jumlah ekuitas yang menjadi hak pemegang saham biasa dengan jumlah saham biasa yang beredar”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2018 dalam SAK EMKM, “Ekuitas merupakan hak sisa atas aset suatu entitas setelah dikurangi semua kewajibannya”. Menurut Kieso *et al.* (2020), “Ekuitas sering disebut sebagai modal pemegang saham atau

modal perusahaan. Dalam laporan perubahan posisi keuangan, ekuitas biasanya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berikut:”

1. “*Share capital*”

“Nilai *par* atau nilai yang ditentukan dari saham yang diterbitkan. Ini mencakup saham biasa (*ordinary shares*) dan saham preferen (*preference shares*)”. Menurut Weygandt *et al* (2022), “Saat saham baru diterbitkan, *share capital* akan dicatat dengan cara berikut:”

<i>Cash</i>	<i>xxx</i>	
<i>Share capital – ordinary/preference</i>		<i>xxx</i>

2. “*Share premium*”

“Selisih antara jumlah yang dibayarkan atas *par* atau nilai yang ditentukan”. Menurut Weygandt *et al* (2022), “Saat kondisi tersebut terjadi, jurnal yang digunakan untuk pencatatan adalah sebagai berikut:”

<i>Cash</i>	<i>xxx</i>	
<i>Share capital – ordinary/preference</i>		<i>xxx</i>
<i>Share premium – ordinary/preference</i>		<i>xxx</i>

3. “*Retained earnings*”

“Penghasilan perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen dan disimpan dalam perusahaan”.

4. “*Accumulated other comprehensive income*”

“Jumlah total dari item-item pendapatan komprehensif lainnya”.

5. “*Treasury shares*”

“Jumlah saham biasa (*ordinary shares*) yang telah dibeli kembali oleh perusahaan”.

Menurut Weygandt *et al.*, 2022 “Saat terjadi pembelian saham treasuri, pencatatannya akan dilakukan sebagai berikut:”

<i>Treasury shares</i>	<i>xxx</i>	
<i>Cash</i>		<i>xxx</i>

Menurut Weygandt *et al.*, 2022 “Saat perusahaan menjual saham treasuri dengan harga di atas nilai perolehannya, pencatatannya akan dilakukan sebagai berikut:”

<i>Cash</i>	<i>xxx</i>	
<i>Treasury shares</i>		<i>xxx</i>
<i>Share premium – treasury shares</i>		<i>xxx</i>

Menurut Weygandt *et al.*, 2022 “Saat perusahaan menjual saham treasuri dengan harga di bawah nilai perolehannya, pencatatannya akan dilakukan seperti berikut:”

<i>Cash</i>	<i>xxx</i>	
<i>Share premium – treasury shares</i>	<i>xxx</i>	
<i>Treasury shares</i>		<i>xxx</i>

Menurut Kieso *et al.*, 2020 “Jika perusahaan tidak memiliki cukup *share premium-treasury shares*, maka perusahaan akan mendebitkan kekurangannya ke dalam *retained earnings*, dan pencatatannya akan dilakukan sebagai berikut:”

<i>Cash</i>	<i>xxx</i>	
<i>Share premium – treasury shares</i>	<i>xxx</i>	
<i>Retained earnings</i>	<i>xxx</i>	
<i>Treasury shares</i>		<i>xxx</i>

6. “*Non-controlling interest (minority interest)*”

“Bagian ekuitas dari perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk”.

Menurut Weygandt *et al* (2022), “Jumlah saham biasa yang beredar merujuk pada jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan dan saat ini dimiliki oleh pemegang saham. Untuk menghitung jumlah saham biasa yang beredar, dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah saham yang dibeli kembali atau diperoleh dengan jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan”. Menurut Kieso *et al.*, (2020) “Jenis-jenis saham dapat dibagi sebagai berikut:”

1. “Saham Biasa (*Ordinary Shares*)”

“Saham biasa mewakili kepemilikan atas sisa kepentingan perusahaan yang menanggung risiko kerugian serta memperoleh keuntungan dari kesuksesan perusahaan. Pemegang saham biasa berhak menerima dividen atau aset apabila terjadi likuidasi”.

2. “Saham Preferen (*Preference Shares*)”

“Saham ini memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Keistimewaan tersebut mencakup prioritas dalam pembayaran dividen, hak lebih terhadap aset dalam likuidasi, kemampuan untuk dikonversi menjadi saham biasa, opsi untuk ditebus oleh perusahaan, serta tidak diberikan hak suara”.

3. “Saham Treasuri (*Treasury Shares*)”

“Saham treasuri adalah saham perusahaan yang telah dibeli kembali setelah diterbitkan dan tidak lagi beredar di pasar”.

Menurut Weygandt *et al.* (2022), “Dalam perdagangan saham terdapat beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan penerbitannya, diantaranya:”

1. “Saham yang Diberikan (*Authorized Shares*)”

“Jumlah maksimum saham yang dapat diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam akta pendiriannya”.

2. “Saham yang Diterbitkan (*Issued Shares*)”

“Jumlah saham yang telah diterbitkan dan diberikan kepada pemegang saham oleh perusahaan”.

3. “Saham yang Beredar (*Outstanding Shares*)”

“Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham atau jumlah saham yang beredar di pasar, tidak termasuk saham treasuri yang dibeli kembali oleh perusahaan”.

2.3 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2017) dalam Kusuma, Sri, dan Marwati (2024), “Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional normalnya. Selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mencetak laba selama periode

tertentu, rasio ini juga berfungsi untuk menilai tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola operasional perusahaan”. Menurut Karjono (2021), “Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap keputusan para investor terkait investasi yang mereka lakukan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, sedangkan profitabilitas yang rendah cenderung mendorong investor untuk menarik investasinya. Bagi perusahaan, profitabilitas berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan usaha. Profitabilitas juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi suatu perusahaan, sehingga diperlukan analisis untuk melakukan penilaian tersebut”.

Menurut Weygandt *et al.*(2022), “Ada beberapa rasio yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas suatu perusahaan, yaitu:”

1. “*Profit Margin*”

“*Profit margin* menunjukkan persentase dari setiap satuan mata uang penjualan yang berhasil dikonversi menjadi laba bersih”.

2. “*Asset Turnover*”

“*Asset turnover* mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan”.

3. “*Return on Assets*”

“*Return on assets* mengindikasikan seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba”.

4. “*Return on Equity*”

“*Return on equity* mengukur jumlah laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap satuan mata uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa”.

5. “*Earning per Share*”

“*Earnings per share* mengukur laba bersih yang diperoleh untuk setiap lembar saham yang beredar”.

6. “*Price Earning Ratio*”

“*Price earnings ratio* digunakan untuk menilai perbandingan antara harga pasar per lembar saham biasa dengan laba per saham”.

7. “*Payout Ratio*”

“*Payout ratio* menunjukkan persentase laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai”.

Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan menggunakan *Return on Assets (ROA)*. Menurut Ross *et al.* (2022), “*Measures the rate of return on the firm assets*”. Artinya, “*Return on Assets* dapat mengukur tingkat pengembalian atas aset yang dimiliki perusahaan”. Menurut Kieso *et al.* (2020), “*The return on assets measures profitability well because it combines the effects of profit margin and asset turnover*”. Artinya “Kembali aset mengukur profitabilitas dengan baik karena menggabungkan efek margin keuntungan dan perputaran aset”. Menurut Kasmir (2012) dalam Purba dan Mahendra (2022), “*Return On Assets (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya total aktiva”.

Menurut Sukesti *et al.*, (2021), “Semakin tinggi nilai *ROA*, semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang lebih tinggi ini pada akhirnya dapat memberikan imbal hasil yang lebih baik bagi investor dan berdampak positif terhadap harga saham perusahaan”. Menurut Charulina (2023), “*Return on Assets (ROA)* mampu memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui optimalisasi penggunaan aset yang dimiliki untuk mendukung operasional perusahaan. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan, terutama investor. Dengan demikian, tingginya *ROA* akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, memaksimalkan potensi aset yang dimiliki, serta menghasilkan laba bersih yang lebih besar. Nilai *ROA* yang tinggi juga berpotensi meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut”. Menurut Rahmayanti *et al.*, (2024), “Penurunan *ROA* dapat mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan investasi berlebihan pada aset yang tidak mampu mendorong pertumbuhan laba, yang bisa menjadi sinyal adanya

masalah dalam perusahaan”. Menurut Weygandt *et al.*, 2022 “Return On Assets (ROA) dapat dihitung menggunakan rumus berikut:”

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Net income}}{\text{Average total assets}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

Net income : Laba bersih yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan dalam tahun berjalan

Average total assets : Rata-rata total ekuitas perusahaan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan

Mengenai perhitungan *average total assets*, menurut Weygandt *et al.*, (2022), “dapat dihitung menggunakan rumus:”

$$\text{Average total asset} = \frac{\text{Asset}_t + \text{Asset}_{(t-1)}}{2} \quad (2.4)$$

Keterangan:

Asset_t : Jumlah aset pada tahun t

Asset_(t-1) : Jumlah aset 1 tahun sebelum tahun t

Menurut Prasetya dan Rahmi (2025), “Laba bersih merupakan keuntungan yang didapatkan perusahaan setelah seluruh beban, termasuk pajak, dikurangkan dari pendapatan”. Pendapatan bersih yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada laba tahun berjalan perusahaan. Menurut IAI (2020) dalam SAK Entitas Privat, “Laba tahun berjalan diperoleh dengan mengurangi pendapatan tahun berjalan dengan beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto. Laba bruto tersebut kemudian ditambahkan dengan pendapatan lain-lain serta bagian laba dari entitas asosiasi, lalu dikurangi dengan biaya distribusi, biaya administrasi, beban lainnya, dan biaya pendanaan untuk menghasilkan laba sebelum pajak. Setelah itu, laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan untuk mendapatkan laba tahun berjalan dari operasi yang berlanjut. Selanjutnya, laba

tahun berjalan dari operasi yang berlanjut dikurangi dengan kerugian yang timbul dari operasi yang dihentikan untuk menghasilkan laba tahun berjalan”.

“Menurut Kieso *et al.* (2020), “Laporan laba rugi memiliki komponen-komponen sebagai berikut:”

1. “*Sales or Revenue Section*”
“Menyajikan penjualan, diskon, tunjangan, retur, dan lainnya informasi terkait. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah bersih pendapatan penjualan”.
2. “*Cost of Goods Sold*”
“Menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan”.
3. “*Gross Profit*”
“Pendapatan dikurangi harga pokok penjualan”.
4. “*Selling Expense*”
“Melaporkan pengeluaran yang dihasilkan dari upaya yang dilakukan perusahaan penjualan”.
5. “*Administrative or General Expenses*”
“Melaporkan biaya administrasi umum”.
6. “*Other Income and Expense*”
“Termasuk sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai kategori pendapatan dan pengeluaran yang disediakan di atas. Item seperti keuntungan dan kerugian atas penjualan aset berumur panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan di bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga sering dilaporkan”.
7. “*Income from Operations*”
“Hasil perusahaan dari operasi normal”.
8. “*Financing Costs*”
“Bagian terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan, selanjutnya disebut beban bunga”.
9. “*Income before Income Tax*”
“Total penghasilan sebelum pajak penghasilan”.

10. *“Income Tax”*

“Bagian singkat yang melaporkan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan”.

11. *“Income from Continuing Operations”*

“Hasil perusahaan sebelum untung atau rugi pada operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak mempunyai keuntungan atau kerugian operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan bersih penghasilan”.

12. *“Discontinued Operations”*

“Keuntungan atau kerugian akibat disposisi komponen suatu perusahaan”.

13. *“Net Income”*

“Hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu”.

14. *“Non-Controlling Interest”*

“Menyajikan alokasi laba bersih kepada pengendali pemegang saham dan kepentingan non-pengendali”.

15. *“Earning per Share”*

“Jumlah per saham yang dilaporkan”.

Weygandt *et al.* (2019), *“Assets are resources a business owns. The business uses its assets in carrying out such activities as production and sales. The common characteristic possessed by all assets is the capacity to provide future services or benefits”*. Artinya “Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan menggunakan asetnya dalam menjalankan aktivitas seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh semua aset adalah kapasitas untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan”.

Menurut Weygandt *et al.*, 2019, *“Average total asset dapat dihitung menggunakan selisih saldo awal dan saldo akhir total aset dibagi dua. Terdapat dua jenis aset yaitu current assets dan non-current assets. Current assets are cash and other assets a company expects to convert into cash, sell, or consume either in one year or in the operating cycle”*, artinya aset lancar adalah aset lain yang diharapkan dapat dikonversi oleh perusahaan menjadi uang tunai, menjual, atau dikonsumsi

baik dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi. Menurut Kieso *et al.*, 2020, “Terdapat 5 komponen utama dalam aset lancar, yaitu:”

1. “*Inventories*”

“Persediaan (*inventories*) adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi barang yang akan dijual”.

2. “*Prepaid expenses*”

“Beban yang dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi”.

3. “*Receivable*”

“Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima uang, barang, atau jasa dari pelanggan atau pihak lain, baik karena pinjaman maupun penjualan secara kredit”.

4. “*Short-term investments*”

“Investasi dengan jangka waktu jatuh tempo antara 3 hingga 12 bulan”.

5. “*Cash and cash equivalents*”

“Kas umumnya dianggap terdiri dari uang tunai dan simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (dana yang tersedia di lembaga keuangan). Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang”.

Menurut Kieso *et al.* (2020), “Terdapat beberapa kelompok aset tidak lancar, yaitu:”

1. “Investasi Jangka Panjang (*long-term investments*)”

“Investasi Jangka Panjang dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu yang pertama investasi pada surat berharga, seperti obligasi, saham biasa, atau surat utang jangka Panjang. Selanjutnya, yang kedua adalah investasi pada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah yang digunakan untuk spekulasi. Kemudian, yang ketiga adalah Investasi yang disisihkan pada dana khusus, misalnya *sinking fund*, dana pensiun, atau perluasan pabrik dana. Dan, yang keempat adalah Investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang tidak dikonsolidasi”.

2. “Properti, Pabrik, dan Peralatan (*property, plant, and equipment*”
“Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud dan berumur panjang yang digunakan dalam operasi rutin suatu perusahaan bisnis. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan membuang-buang sumber daya (mineral). Dengan pengecualian tanah, perusahaan akan mengalami depresiasi (misalnya, bangunan) atau menghabiskan (misalnya cadangan minyak) aset-aset ini.
3. “Aset tidak berwujud (*Intangible Assets*)”
“Aset tak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Aset ini dapat diidentifikasi aset termasuk paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan menghapuskan (mengamortisasi) aset tidak berwujud dengan umur terbatas selama umur hukum atau masa manfaatnya yang lebih rendah. Secara berkala menilai penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas (seperti nama dagang tertentu)”.
4. “Aset lainnya (*other asset*)”
“Item yang termasuk dalam bagian “Aset lain-lain” sangat bervariasi dalam praktiknya. Beberapa termasuk item seperti biaya dibayar di muka jangka panjang dan piutang tidak lancar. Item lain yang mungkin dimasukkan adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan uang tunai atau surat berharga yang dibatasi penggunaannya. Perusahaan harus membatasi hal ini bagian untuk memasukkan hanya pos-pos tidak biasa yang cukup berbeda dari aset yang termasuk dalam kategori tertentu”.

2.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Bahrim *et al.*, (2025), “Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu. Selain itu, rasio ini juga mencerminkan seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya”. Menurut Cindy dan Ardini (2023), “Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi mencerminkan prospek usaha yang baik serta kemampuan perusahaan dalam mengelola aset secara

optimal. Peningkatan laba dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan laba bersih perusahaan, yang menjadi indikator positif bagi kondisi keuangannya. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin baik pula nilai perusahaan di mata publik. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Profitabilitas memegang peranan penting dalam menentukan nilai perusahaan, karena menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan oleh pemegang saham saat mengambil keputusan investasi. Kenaikan laba bersih biasanya berdampak pada peningkatan harga saham perusahaan. Apabila harga saham meningkat, maka hal tersebut mengindikasikan kinerja keuangan yang baik, sehingga mendorong minat investor untuk berinvestasi. Kinerja keuangan yang positif pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, tingginya tingkat keuntungan juga menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan imbal hasil (*return*) yang menarik bagi investor. Hal ini juga menandakan bahwa perusahaan telah mengelola serta memanfaatkan asetnya dengan efisien dan efektif, yang turut berkontribusi dalam peningkatan nilai perusahaan”.

Menurut Susanti dan Kusumawati (2024), “Tingginya tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keyakinan kepada investor untuk menanamkan modalnya. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya secara optimal untuk menghasilkan laba pada setiap periode. Semakin tinggi tingkat pengembalian atas ekuitas, maka akan berpotensi menaikkan harga saham, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alifian dan Susilo (2024) menyatakan profitabilitas yang diprosikan dengan *ROA* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (*PBV*). Serta penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Kusumawati (2024), menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha₁ : Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.5 Leverage

Menurut Nababan (2021) dalam Rusdi dan Helmayunita (2023), "*Leverage* adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Dewantari *et al.* (2019) dalam Amelia dan Meidiyustiani (2024), "*Leverage* merujuk pada praktik perusahaan dalam menggunakan dana pinjaman untuk mendanai aset-asetnya. Namun, kelebihan pembiayaan melalui utang dipandang kurang sehat karena dapat mengurangi laba serta menurunkan nilai perusahaan. Tingginya tingkat utang perusahaan berisiko membuat perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan nilai perusahaan".

Menurut Mipo (2022), "Penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan, baik yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang akan menimbulkan suatu efek yang biasa disebut dengan *leverage*. Permasalahan *leverage* akan selalu dihadapi oleh perusahaan, bila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi maupun biaya finansial. Biaya tetap operasi merupakan beban atau biaya tetap yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi pelaksanaan investasi, sedangkan biaya finansial merupakan beban atau biaya yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi pendanaan. Jadi, beban atau biaya tetap sebenarnya merupakan risiko yang harus ditanggung perusahaan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan keuangan".

Menurut Desriyunia *et al.*, (2023), "Terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang umum digunakan oleh perusahaan. Adapun beberapa rasio tersebut antara lain:"

1. "*Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*"

"Rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi total utang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai melalui

utang, serta sejauh mana utang berpengaruh dalam pengelolaan aset perusahaan”.

2. “*Debt to Equity Ratio*”

“Rasio ini digunakan untuk menilai hubungan antara total utang (termasuk utang jangka pendek) dengan total ekuitas. Dengan membandingkan kedua komponen ini, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar dana yang disediakan oleh kreditor dibandingkan dengan dana yang berasal dari pemilik perusahaan”.

3. “*Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*”

“Rasio ini menggambarkan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa bagian dari setiap satuan modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan atas utang jangka panjang”.

4. “*Times Interest Earned*”

“*Times Interest Earned* adalah rasio yang mengukur berapa kali pendapatan dapat digunakan untuk membayar beban bunga. *Times Interest Earned* dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga”.

5. “*Fixed Charge Coverage (FCC)*”

“Merupakan rasio yang mirip dengan *Times Interest Earned*, namun penggunaannya diperluas untuk memperhitungkan kewajiban tetap lainnya, seperti pembayaran atas kontrak sewa (*lease contract*) atau utang jangka panjang”.

Dalam penelitian ini, *leverage* diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Menurut Santoso dan Junaeni (2022), “*DER* mampu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan modal yang perusahaan miliki”. Menurut Ross *et al.* (2022), “Jika *DER* bernilai kurang dari 1, proporsi penggunaan utang dalam struktur modal lebih kecil dibandingkan penggunaan modal. Sebaliknya, jika *DER* bernilai lebih dari 1, proporsi penggunaan utang dalam struktur modal lebih besar dibandingkan penggunaan modal”.

Menurut Ross *et al.* (2019), “*Debt to Equity Ratio* dihitung dengan rumus sebagai berikut:”

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.5)$$

Keterangan:

Total debt : Total utang suatu perusahaan

Total equity : Total ekuitas suatu perusahaan

Menurut Yoewono (2022), “Liabilitas adalah kewajiban atau utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar perusahaan”. “Terdapat 2 jenis utang (*Debt/liability*), yaitu liabilitas jangka panjang (*non current liabilities*) dan liabilitas jangka pendek (*current liabilities*). Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayar oleh perusahaan setelah satu tahun. Contoh dari liabilitas jangka Panjang (*current liabilities*) adalah *bonds payable, mortgages payable, long-term notes payable, dan lease liabilities*. Obligasi (*Bonds payable*) adalah suatu bentuk wesel bayar berbunga yang diterbitkan oleh perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintah. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, itu adalah meminjam uang. Orang yang membeli obligasi (pemegang obligasi) sedang meminjamkan uang. *Mortgages payable* adalah utang jangka panjang yang menjadikan aset sebagai jaminan atas obligasi tersebut. *Long-term notes payable* adalah suatu bentuk utang wesel yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. *Lease liabilities* adalah Sewa adalah perjanjian kontrak antara *lessor* (pemilik properti) dan *lessee* (penyewa properti)” (Weygandt *et al.*, 2022).

“Utang jangka pendek (*current liabilities*) adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu tertentu tahun mendatang atau siklus operasinya, mana saja yang lebih lama. Contoh *current liabilities* adalah *accounts payable, notes payable, dividend payable, dan unearned revenue*. *Account payable* adalah utang dagang atau utang usaha yang merupakan saldo utang kepada pihak

lain yang timbul karena adanya jeda waktu penerimaan jasa atau barang dengan pelunasan yang belum dibayarkan oleh perusahaan. *Notes payable* adalah perjanjian tertulis yang diterbitkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk membayarkan utang pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang. *Dividend payable* adalah jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan yang telah disetujui oleh dewan direksi. *Unearned revenue* adalah kewajiban yang timbul akibat perusahaan telah menerima pembayaran terlebih dahulu namun belum melakukan pelaksanaan atas kewajibannya” (Weygandt *et al.*, 2022).

Menurut Weygandt *et al.* (2022), “*Equity* dapat dihitung dengan total aset dikurangi dengan total kewajiban”. Menurut Kieso *et al.* (2020), “*Equity* dibagi menjadi 6 bagian yaitu:”

1) “*Share Capital*”

“*Par atau stated value* saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa dan saham preferen”.

2) “*Share Premium*”

“Kelebihan jumlah yang dibayarkan melebihi nilai nominal atau nilai yang dinyatakan”.

3) “*Retained Earnings*”

“Pendapatan perusahaan yang tidak didistribusikan”.

4) “*Accumulated Other Comprehensive Income*”

“Jumlah agregat lainnya dari item pendapatan komprehensif”.

5) “*Treasury Shares*”

“Jumlah saham biasa yang dibeli kembali”.

6) “*Non-Controlling Interest*”

“Sebagian ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor”.

2.6 Pengaruh *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Susilawati dan Purnomo (2023), “*Leverage* adalah penggunaan utang oleh perusahaan untuk memperkuat pendanaan kegiatan usahanya”. Menurut

Kustyaningrum *et al.*, (2016) dalam Cinthya *et al.*, (2022), “Penggunaan utang yang berlebihan dapat membahayakan kondisi keuangan perusahaan, karena perusahaan bisa masuk dalam kategori *extreme leverage* (*leverage* ekstrem), yaitu situasi di mana perusahaan terbebani oleh tingkat utang yang sangat tinggi sehingga kesulitan untuk melepaskan diri dari tekanan kewajiban tersebut”.

Menurut Novarina dan Agustin (2018) dalam Sabakodi dan Andreas (2024), “Jika perusahaan memiliki DER yang rendah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan modal sendiri sebagai sumber pendanaan, yang merupakan kondisi positif. Dalam situasi kritis, perusahaan dengan proporsi modal lebih besar dibanding utang cenderung lebih mampu bertahan”. Menurut Ardelia dan Retnani (2024), “Semakin tinggi rasio *Debt to Equity Ratio* (*DER*) yang dimiliki suatu perusahaan, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap nilai perusahaan karena menunjukkan adanya kewajiban tambahan yang harus dipenuhi. Jika perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi dan tidak mampu mengelolanya secara efisien, maka utang tersebut bisa menjadi beban yang sulit dibayar, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar atau bahkan kebangkrutan. Kondisi ini memberikan sinyal yang kurang baik kepada para investor karena mencerminkan struktur permodalan perusahaan yang lemah, serta meningkatkan kekhawatiran akan potensi kebangkrutan yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Akibatnya, kepercayaan investor pun menurun dan mereka akan mempertimbangkan ulang untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut”.

Menurut Nurjanah dan Purnama (2021), “Perusahaan yang menggunakan semakin banyak utang maka akan meningkatkan beban bunga dan pokok pinjaman yang harus dibayar. Hal ini memperbesar kemungkinan perusahaan menghadapi *default*, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya akibat kewajiban yang semakin besar, namun apabila perusahaan hanya menggunakan modal sendiri (laba ditahan) yang jumlahnya kecil maka akan menutup kesempatan dalam memperoleh keuntungan dari yang diharapkan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardelia dan Retnani (2024) menyatakan *leverage* yang diprosikan dengan *DER* memiliki pengaruh negatif

terhadap nilai perusahaan (*PBV*). Serta penelitian yang dilakukan oleh Syahrani, Merawati, dan Tandio (2023), menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha₂ : *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

2.7 Likuiditas

Menurut Fitriana (2024), “Rasio likuiditas merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Artinya, jika perusahaan harus membayar utang yang telah jatuh tempo, perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasinya”. Menurut Stevanio dan Ekadjaja (2021), “Perusahaan yang likuid akan dipercaya oleh investor karena dianggap kinerja perusahaan baik. Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan juga menggunakan dana internalnya terlebih dahulu untuk membiayai investasinya sebelum menggunakan pembiayaan eksternal melalui utang”.

Menurut Shalini *et al.*, (2022), “Terdapat dua kemungkinan hasil dalam pengukuran rasio likuiditas. Jika perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, maka perusahaan tersebut dikategorikan dalam kondisi likuid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dianggap tidak likuid. Risiko terkait likuiditas dapat diminimalkan dengan meningkatkan nilai rasio likuiditas. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi umumnya lebih menarik bagi investor, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kenaikan harga saham akibat tingginya permintaan pasar”.

Menurut Shofwatun *et al.*, (2021), “terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menghitung rasio likuiditas, yaitu:”

1) “*Current ratio*”

“*Current ratio* atau rasio lancar untuk mengetahui kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan kreditur jangka pendek dapat dipenuhi oleh aktiva yang

diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan utang yang sudah jatuh tempo. Semakin tinggi rasio lancar, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Rasio lancar adalah ukuran yang umum digunakan dalam atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo”.

2) “*Quick ratio*”

“*Quick ratio* menunjukkan aktiva lancar yang paling likuid yang mampu menutupi utang lancarnya. Semakin besar rasio ini semakin baik. *Quick ratio* adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar karena pembilangnya melegemisasi persediaan yang dianggap aktiva lancar yang sedikit likuid dan kemungkinan menjadikan sumber kerugian”.

3) “*Cash ratio*”

“*Cash ratio* adalah kas ditambah dengan efek atau surat berharga, kas, dan efek dianggap sebagai aktiva paling likuid, yang mudah dicairkan dalam jangka pendek. Semakin tinggi rasio kas berarti jumlah uang tunai yang tersedia semakin besar, sehingga pelunasan utang terjamin”.

Pada penelitian ini, rasio diukur dengan *Current Ratio (CR)*. Menurut Brigham dan Houston (2022), “*Current ratio* menunjukkan sejauh mana kewajiban lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat”. Menurut Brigham dan Houston (2022), “*Current Ratio* atau rasio lancar dapat menunjukkan sampai sejauh apa liabilitas lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Rasio lancar (*current ratio*) merupakan salah satu rasio yang paling sering digunakan oleh pemangku kepentingan dikarenakan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya”.

Menurut Weygandt *et al.* (2022)., “*Current ratio* dapat dihitung menggunakan rumus:”

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.6)$$

Keterangan:

Current Assets : Aktiva lancar perusahaan

Current Liabilities : Kewajiban lancar perusahaan

Menurut Weygandt *et al.*, (2022). “*Current assets* adalah aset yang diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai atau digunakan oleh perusahaan dalam waktu satu tahun atau siklus operasinya, mana saja yang lebih lama. Terdapat 5 komponen utama dalam aset lancar, yaitu:”

1. “*Cash*”

“Kas mencakup uang logam, uang kertas, cek, wesel, serta dana tunai yang disimpan baik di bank maupun di tempat penyimpanan lainnya. Banyak perusahaan menggunakan istilah “kas dan setara kas” saat melaporkan saldo kas dalam laporan keuangan”.

2. “*Investments*”

a. “*Debt investments* (investasi utang): Investasi dalam bentuk surat utang, seperti obligasi pemerintah atau korporasi, termasuk dalam kategori investasi utang”.

b. “*Share investments* (investasi saham): Investasi saham merujuk pada kepemilikan saham perusahaan lain sebagai bagian dari portofolio investasi”.

3. “*Receivables*”

“Piutang merupakan klaim atas jumlah uang yang harus diterima dari individu atau perusahaan lain. Piutang biasanya diharapkan dapat ditagih dalam bentuk kas. Piutang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:”

a. “Piutang Usaha (*Accounts Receivable*)”

“Jumlah yang terutang dari pelanggan akibat transaksi penjualan barang atau jasa. Biasanya, pembayaran piutang usaha diharapkan diterima dalam jangka waktu 30 hingga 60 hari”.

b. “Piutang Wesel (*Notes Receivable*)”

“Piutang wesel adalah klaim tertulis yang dijamin dengan dokumen formal, atas sejumlah uang yang akan diterima. Biasanya, piutang ini mencakup bunga dan memiliki jangka waktu penagihan 60 hingga 90 hari atau lebih”.

c. “Piutang Lain-lain (*Other Receivables*)”

“Kategori ini mencakup piutang di luar kegiatan usaha utama, seperti piutang bunga, pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka karyawan, serta klaim atas pengembalian pajak penghasilan”.

4. “*Inventories*”

“Persediaan memiliki dua karakteristik utama, yaitu:”

- a. “Dimiliki oleh perusahaan sebagai bagian dari aset usaha”
- b. “Berada dalam kondisi siap untuk dijual kepada pelanggan dalam kegiatan operasional sehari-hari”.

5. “*Prepaid expenses*”

“Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang diakui secara bertahap seiring berjalannya waktu, seperti pembayaran untuk sewa atau asuransi, ataupun karena penggunaan seperti pada kasus persediaan barang”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan, “Suatu entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:”

1. Entitas mengharapkan untuk merealisasikan, menjual, atau menggunakan aset tersebut dalam siklus operasi normal
2. Aset dimiliki untuk tujuan diperdagangkan;
3. Aset diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan; atau
4. Aset berupa kas atau setara kas (sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 207: Laporan Arus Kas), kecuali jika aset tersebut dibatasi penggunaannya untuk melunasi liabilitas yang jatuh tempo minimal dua belas bulan setelah periode pelaporan.

“*Current liabilities* adalah kewajiban yang umumnya diharapkan dapat diselesaikan oleh perusahaan secara normal siklus operasi atau satu tahun, mana

yang lebih lama. Kewajiban lancar meliputi utang yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan maupun kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan bisnis”. (Weygandt *et al.*, 2022). Menurut Kieso *et al.* (2020), “kewajiban lancar umumnya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:”

1. “Utang Usaha (*Accounts Payable*)”
“Utang usaha merupakan jumlah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga atas pembelian barang dagangan, persediaan, atau jasa yang belum dilunasi. Utang ini timbul akibat adanya selang waktu antara penerimaan aset atau jasa dengan pembayaran”.
2. “Utang Wesel (*Notes Payable*)”
“Utang wesel adalah pernyataan tertulis untuk membayar sejumlah dana tertentu pada waktu yang telah ditetapkan di masa depan. Utang ini biasanya berasal dari transaksi pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya”.
3. “Bagian Lancar dari Utang Jangka Panjang (*Current Maturities of Long-Term Debt*)”
“Melaporkan porsi utang jangka panjang, seperti obligasi, hipotek, atau utang lain, yang jatuh tempo dalam satu tahun fiskal berikutnya sebagai bagian dari kewajiban lancar”.
4. “Kewajiban Jangka Pendek yang Diharapkan untuk Dibiayai Ulang (*Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced*)”
“Utang jangka pendek ini mencakup kewajiban yang dijadwalkan untuk dilunasi dalam waktu satu tahun sejak tanggal laporan keuangan atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan”.
5. “Dividen yang Harus Dibayar (*Dividends Payable*)”
“Jumlah dividen tunai yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pemegang sahamnya berdasarkan keputusan dewan direksi atau persetujuan pemegang saham”.
6. “Uang Muka dan Setoran dari Pelanggan (*Customer Advances and Deposits*)”
“Kewajiban lancar juga dapat mencakup penerimaan tunai dari pelanggan atau karyawan yang dapat dikembalikan di kemudian hari”.

7. “Pendapatan Diterima Dimuka (*Unearned Revenues*)”
 “Perusahaan mencatat pendapatan yang diterima sebelum barang dikirimkan atau jasa diberikan sebagai pendapatan diterima dimuka”.
8. “Utang Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai (*Sales and Value-Added Taxes Payable*)”
 “Pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap tahap produksi maupun penjualan akhir suatu produk atau jasa”.
9. “Utang Pajak Penghasilan (*Income Taxes Payable*)”
 “Perusahaan mengakui kewajiban pajak atas laba bersih yang dihitung berdasarkan pengembalian pajak”.
10. “Kewajiban Terkait Karyawan (*Employee-Related Liabilities*)”
 “Perusahaan mencatat jumlah utang kepada karyawan untuk gaji atau upah sebagai kewajiban lancar pada akhir periode akuntansi. Selain itu, kewajiban lain yang terkait dengan kompensasi karyawan juga dilaporkan, seperti:”
 - a. “Pemotongan gaji (*payroll deductions*)”
 - b. “Bonus yang diberikan (*bonuses*)”.

Berdasarkan PSAK 1 paragraf 69 (IAI, 2022), “liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:”

- a. “Entitas mengharapkan untuk menyelesaikan liabilitas dalam siklus operasi normalnya”
- b. “Liabilitas tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan”
- c. “Liabilitas akan diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan”
- d. “Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan”.

2.8 Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Rahma dan Munfaqiroh (2021), “Likuiditas dalam konteks *Current Ratio* (*CR*) berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini mencerminkan seberapa baik perusahaan dapat melunasi utang lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki. Semakin tinggi persentase *CR*,

maka semakin baik tingkat likuiditas perusahaan, yang pada akhirnya memberikan citra positif terhadap kondisi keuangan perusahaan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor”.

Menurut Wuliasari dan Harjanto (2022), “Semakin tinggi *current ratio*, semakin besar aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi utang jangka pendek dengan aset lancarnya”. Menurut Shelita dan Dermawan (2024), “Tingkat likuiditas yang tinggi pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengandalkan dana internal yang mencukupi. Kondisi ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas tanpa harus bergantung secara berlebihan pada utang. Keadaan tersebut memberikan sinyal positif kepada investor, karena perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi cenderung tidak mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, termasuk dalam hal pembayaran dividen”.

Menurut Chynthiawati dan Jonnardi (2022), “Investor cenderung lebih memilih perusahaan dengan tingkat rasio likuiditas yang tinggi dibandingkan dengan yang rendah, karena mereka meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan operasionalnya serta dapat memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Tingginya tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan”.

Menurut Karin dan Tanusdjaja (2022), “*Current Ratio* digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran seberapa besar nilai aktiva lancar dapat memenuhi kewajiban lancarnya. *Current Ratio* yang rendah akan mengakibatkan penurunan harga pasar saham pada perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika *Current Ratio* tinggi akan memberikan kepercayaan pada investor untuk berinvestasi. Nilai *Current Ratio* yang sangat tinggi juga tidak baik, karena hal tersebut memberikan indikasi bahwa kemampuan perusahaan kurang maksimal dalam mengoperasikan laba yang diperoleh”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lisna (2024) menyatakan likuiditas yang diprosikan dengan *Current Ratio* memiliki pengaruh positif

terhadap nilai perusahaan (*PBV*). Dan penelitian yang dilakukan Robbany (2021) menyatakan likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (*PBV*). Berdasarkan teori tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha₃ : Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.9 Ukuran Perusahaan

“Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya suatu entitas usaha. Penilaian terhadap ukuran perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti logaritma total aset, log total penjualan, serta kapitalisasi pasar” (Budiantini, 2023). Menurut Herawaty dan Suwito (2005) dalam Budiantini (2023), klasifikasi ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Dalam praktiknya, terdapat beberapa proksi yang umum digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan, antara lain jumlah aset, total penjualan, jumlah karyawan, dan kapitalisasi pasar. Secara umum, skala perusahaan sering kali dilihat dari total aset yang dimiliki sebagai dasar untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan”. Menurut Pujiningsih dalam Prabaningrum *et al.*, (2021), “Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh investor dalam mengambil keputusan investasi, karena ukuran perusahaan dinilai memiliki keterkaitan dengan tingkat risiko yang mungkin dihadapi oleh investor dalam menanamkan modalnya”.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/POJK.04/2017 mengenai “Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada emiten dengan aset skala kecil maupun menengah, pengelompokan ukuran perusahaan dapat ditentukan melalui besaran total aset yang dimiliki. Terdapat tiga kategori ukuran emiten yang ditetapkan, yaitu:

1. Emiten skala kecil, yaitu perusahaan berbadan hukum yang didirikan di Indonesia dengan jumlah total aset tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2. Emiten skala menengah, yaitu perusahaan berbadan hukum yang memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000.000,00 hingga Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
3. Emiten skala besar, yaitu perusahaan berbadan hukum yang memiliki total aset melebihi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Menurut Sahid dan I (2023), “Semakin besar skala suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula minat investor untuk menanamkan modalnya, karena perusahaan dianggap memiliki prospek yang baik”. Menurut Agustin dan Rahayu (2022), “Perusahaan yang memiliki skala besar umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan eksternal serta memiliki daya tahan dan daya saing yang lebih kuat dalam industri. Semakin besar skala perusahaan, semakin tinggi pula peluangnya untuk menghasilkan laba yang berkualitas. Ukuran perusahaan juga menjadi indikator atas besarnya laba yang dapat dicapai, karena perusahaan berskala besar biasanya memiliki kapasitas lebih besar dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil”.

Menurut Siswanti dan Ngumar (2019) dalam Farizki *et al.*, (2021), “Skala perusahaan dapat diidentifikasi melalui jumlah total aset yang dimilikinya, di mana aset tersebut berfungsi untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan”. “Total aset dinilai sebagai indikator yang lebih konsisten dan representatif dalam menggambarkan besarnya suatu perusahaan” (Riyanto, 2016 dalam Susesti dan Wahyuningtyas, 2022). Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural total aset. Menurut Susesti dan Wahyuningtyas (2022), “Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan sebagai berikut:”

$$SIZE = Ln (Total Asset) \quad (2.7)$$

Keterangan:

SIZE : Ukuran Perusahaan

Ln : Logaritma natural

Total Asset : Total Aset Perusahaan

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam berbagai aktivitas operasional, seperti proses produksi maupun penjualan. Ciri utama dari aset adalah kemampuannya dalam memberikan manfaat atau layanan ekonomi di masa mendatang. Dalam konteks bisnis, manfaat ini akan berujung pada penerimaan kas di masa depan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021), “Suatu aset dapat dicatat dalam laporan posisi keuangan apabila terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut akan mengalir kepada entitas, serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara akurat”. Menurut Weygandt *et al.*, (2020), “Aset diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut:”

1. “Aset tidak berwujud (*Intangible assets*)”

Intangible assets adalah hak, keistimewaan, serta keunggulan kompetitif yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi. Bukti keberadaan aset ini dapat berupa dokumen kontrak atau lisensi. Aset tidak berwujud dapat berasal dari beberapa sumber, sebagai berikut:”

1. “Hibah dari pemerintah dalam bentuk paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan nama dagang”
2. “Hasil akuisisi perusahaan lain yang mencakup pembayaran atas *goodwill*”
3. “Pengaturan eksklusif yang muncul dari perjanjian kontrak, misalnya waralaba dan sewa”.

Dalam pencatatan akuntansi, aset tidak berwujud diukur berdasarkan biaya perolehannya, yang mencakup seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak atau keunggulan tersebut. Aset ini diklasifikasikan berdasarkan masa manfaatnya, yaitu memiliki umur terbatas atau tidak terbatas. Apabila aset memiliki umur terbatas, maka biaya perolehannya dialokasikan selama masa manfaatnya melalui proses yang disebut amortisasi, yang serupa dengan depresiasi. Sementara itu, aset tidak berwujud yang memiliki umur tidak terbatas tidak dikenakan amortisasi.

2. “Aset tetap (*Property, plant and equipment*)”

“Aset tetap merupakan sumber daya yang memiliki tiga ciri utama, yaitu memiliki bentuk fisik yang nyata, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual kepada konsumen. Aset jenis ini umumnya memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, biasanya selama beberapa tahun. Dengan pengecualian tanah, sebagian besar aset tetap mengalami penurunan nilai guna seiring berjalannya waktu. Penurunan ini dicatat melalui proses depresiasi, yaitu pengalokasian biaya perolehan aset secara sistematis selama masa manfaatnya. Daripada langsung mencatat seluruh harga beli di awal, perusahaan membebankan sebagian biaya aset setiap tahunnya. Nilai aset tetap yang mengalami penyusutan akan ditampilkan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai perolehannya yang telah dikurangi dengan jumlah akumulasi depresiasi. Akun akumulasi depresiasi ini menunjukkan total penyusutan yang telah dibebankan selama umur aset tersebut”.

3. “Investasi jangka panjang (*Long-term investments*)”

“Investasi jangka panjang pada umumnya mencakup: (1) penanaman modal dalam bentuk saham dan obligasi milik entitas lain yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu yang panjang, biasanya selama beberapa tahun; (2) aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang belum digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan pada saat ini; dan (3) piutang wesel yang jatuh temponya dalam jangka panjang”.

4. “Aset lancar (*Current assets*)”

“Aset lancar merupakan jenis aset yang diperkirakan akan diubah menjadi kas atau dimanfaatkan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu satu tahun atau selama siklus operasional normal perusahaan, tergantung mana yang lebih panjang”.

Menurut IAI dalam KKPK (2018), “Dasar pengukuran aset, sebagai berikut:”

1. “Biaya historis (*historical cost*)”

“Aset diakui berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, atau berdasarkan nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan”.

2. “Biaya kini (*current cost*)”

“Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dikeluarkan apabila aset yang sama atau serupa diperoleh pada saat ini”.

3. “Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*)”

“Aset dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang kemungkinan dapat diterima saat ini melalui penjualan aset dalam kondisi pelepasan normal”.

4. “Nilai kini (*present value*)”

“Aset diukur berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masuk bersih di masa depan yang diharapkan akan diterima dari penggunaan aset dalam kegiatan operasional normal perusahaan”.

2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Setiawan *et al.*, (2021), “Ukuran perusahaan diyakini memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai ukuran perusahaan adalah total aset yang dimiliki. Perusahaan dengan ukuran besar menunjukkan bahwa entitas tersebut berada dalam kondisi pertumbuhan dan perkembangan yang positif, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Kenaikan nilai perusahaan ini dapat terlihat dari bertambahnya total aktiva yang dimiliki, yang nilainya melebihi jumlah kewajiban atau utang perusahaan”.

Menurut Sahid dan I (2023), “Semakin besar skala suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula minat investor untuk menanamkan modalnya, karena perusahaan dianggap memiliki prospek yang baik. Kondisi ini berpotensi mendorong peningkatan terhadap nilai perusahaan”. Menurut Natio dan Viriany (2022), “Ukuran perusahaan dapat dijadikan indikator awal yang mencerminkan total aset yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis. Apabila total aset perusahaan terlalu besar, hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemanfaatan aset belum berjalan secara optimal dan efisien, terutama disebabkan oleh penahanan laba. Kondisi

tersebut bisa menurunkan minat investor, karena potensi imbal hasil yang seharusnya diperoleh menjadi tertunda, sehingga dapat berdampak negatif terhadap citra atau nilai perusahaan di mata investor”.

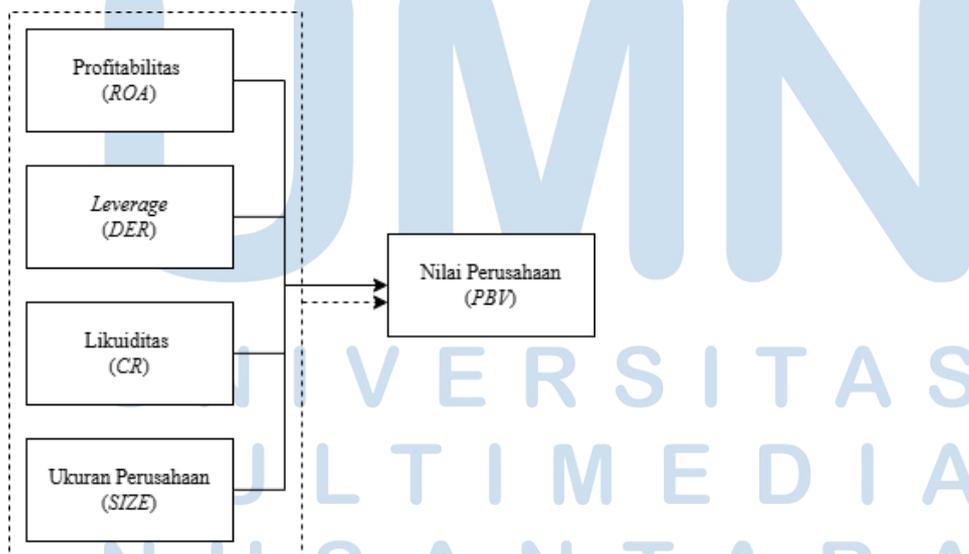
Menurut Diputra dan Rasyid (2025), “Semakin besar ukuran suatu perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik dan dalam kondisi yang stabil, serta terus mengalami pertumbuhan. Kondisi tersebut memberikan sinyal positif kepada para pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sinyal positif ini juga berperan dalam menarik minat pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fabian dan Wijaya (2024) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan (*PBV*). Dan penelitian yang dilakukan Sheryln dan Sudirgo (2025) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (*PBV*). Berdasarkan teori tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha₄ : Ukuran Perusahaan yang diprosikan dengan logaritma natural totas aset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Model Penelitian